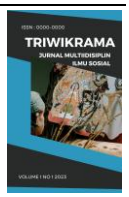
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



KOLABORASI SOSIALISASI PROGRAM STUNTING BKKBN JAWA TIMUR DAN KOMISI IX DI SURABAYA DALAM TAHUN POLITIK

Fitria Dwi Ningrum
UIN Sunan Ampel Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2025
Revised Desember 2025
Accepted Desember 2025
Available online Desember 2025

Email:
fitriadn01@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Stunting masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah melalui BKKBN menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi bersama Komisi IX DPR RI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara BKKBN Jawa Timur dan Komisi IX dalam sosialisasi program stunting di Surabaya, serta melihat pengaruh komunikasi politik terhadap efektivitas program, terutama di tahun politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, dan observasi dokumentatif melalui media daring. Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya merepresentasikan sinergi kebijakan publik, tetapi juga menjadi ruang komunikasi politik yang dimanfaatkan untuk pencitraan elektoral. Meskipun data menunjukkan penurunan angka stunting di Surabaya, belum dapat dipastikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan dampak langsung dari kegiatan sosialisasi politis. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, komunikasi politik dan agenda setting untuk menjelaskan interaksi antara edukasi kesehatan dan kepentingan politik.

Kata kunci: Stunting, BKKBN, Komisi IX, Komunikasi Politik, Kebijakan Publik

Abstract

Stunting is still a major challenge in human resource development in Indonesia. The government through the BKKBN has set the acceleration of stunting reduction as a priority program, one of which is through joint socialization activities with Commission IX of the Indonesian House of Representatives. This study aims to analyze the collaboration between the East Java BKKBN and Commission IX in the socialization of the stunting program in Surabaya, as well as to see the influence of political communication on the effectiveness of the program, especially in political years. This study uses a descriptive qualitative method with interview techniques, documentation, and online media observation. The results show that this collaboration not only represents public policy synergy, but also becomes a political communication space that is used for electoral image building. Although the data shows a decrease in stunting rates in Surabaya, it is not certain that this success is a direct impact of political socialization activities. This study uses public policy theory, political communication, and agenda setting to explain the interaction between health education and political interests.

Keywords: Stunting, BKKBN, Commission IX, Political Communication, Public Policy

PENDAHULUAN

Masalah stunting di Indonesia beberapa tahun terakhir masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta pola asuh yang kurang optimal sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini akan berdampak pada keterlambatan perkembangan pada tinggi badan anak yang lebih pendek dari anak seusianya dan mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan kognitif jangka panjang anak yang dapat mempengaruhi produktivitas dan daya saing di masa depan (Mustika & Syamsul, 2018). Melihat bahaya dari dampak stunting, pemerintah menetapkan penurunan prevelensi stunting sebagai salah satu prioritas nasional. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memegang peran kunci dalam

upaya yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan data Studi Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 21,6%, sementara Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka 19,3%.[1] Dalam upaya mencapai target penurunan stunting, BKKBN menjalin berbagai kolaborasi dengan beberapa mitra di berbagai tingkatan.

Salah satu upaya yang dilakukan BKKBN adalah melalui program sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya pencegahan stunting ini dipengaruhi oleh kurang pengetahuan tentang pola makan bergizi, ketidaktahuan akan pentingnya imunisasi, rendahnya pemanfaatan posyandu dibeberapa daerah serta kemiskinan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam peningkatan angka stunting. Stunting menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat karena dampaknya yang multidimensional, tidak hanya dalam aspek kesehatan publik, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang. Namun, urgensi penaganan stunting yang tinggi membuka ruang partisipasi dari berbagai aktor, termasuk aktor politik, seperti yang dilakukan oleh anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat di Surabaya. Komisi IX sebagai anggota legislatif dan sebagai mitra kerja dari BKKBN Jawa Timur seringkali melakukan kegiatan sosialisasi bersama. Fenomena menarik muncul ketika kegiatan sosialisasi ini beririsan dengan tahun politik, di mana terdapat indikasi penggunaan forum sosialisasi edukasi stunting sebagai sarana membangun citra politik anggota Komisi IX, meskipun kegiatan tersebut dilakukan setelah sesi pemberian edukasi kesehatan oleh BKKBN.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara BKKBN Jawa Timur dan Komisi IX DPR RI dalam kegiatan sosialisasi penurunan stunting di Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana keterlibatan politisi dalam menggunakan komunikasi politik dapat mempengaruhi efektivitas program sosialisasi, khususnya dalam konteks tahun politik yang rawan dengan agenda kampanye tersembunyi.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga telah menyoroti kompleksitas penanganan stunting yang dapat berkontribusi dalam penelitian ini. Subki Abdul Qadir, dkk. yang menekankan strategi komunikasi program anti stunting anggota DPR di daerah pemilih (Qadir et al., 2024). Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menyoroti pentingnya sosialisasi program anti-stunting dengan menggunakan teori komunikasi dan adanya peran aktor dari Komisi IX DPR RI dalam sosialisasi stunting. Namun, kedua penelitian ini memiliki fokus yang berbeda penelitian pada artikel tersebut menyoroti bagaimana anggota DPR RI melakukan sosialisasi di daerah pemilihan Sumatera Barat, sementara penelitian ini berfokus pada kolaborasi BKKBN dan Komisi IX dalam sosialisasi di Surabaya di tahun politik.

Rini Pratiwi, dkk (Pratiwi et al., 2024) yang sejalan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas peran BKKBN dalam penanganan stunting, dan sama-sama meerujuk pada Perpres No. 72 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Penelitian tersebut menyoroti pelaksanaan program stunting oleh BKKBN melalui kerja sama lintas sektor tanpa melibatkan dimensi politik. Dengan fokus pada efektivitas teknis dan koordinasi kelembagaan dalam mendukung target nasional penurunan prevelensi stunting. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program stunting berjalan sesuai dengan kebijakan. Sementara perbedaan dari penelitian ini menganalisis adanya intervensi kepentingan elektoral saat sosialisasi dilakukan bersama aktor legislatif yang punya agenda politik.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ariyanto, dkk (Ariyanto et al., 2023). Penelitian ini mengkaji keberhasilan program ELSIMIL yang menekankan pentingnya pendekatan edukatif

[1] https://layanandata.kemkes.go.id/katalog-data/ssgi/visualisasi-data/visualisasi-ssgi di akses pada 15 Mei 2025, Pukul 15.20.

kepada calon pengantin melalui penggunaan teknologi. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dengan menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen petugas dalam mengedukasi. Penelitian tersebut mengkaji program ELSIMIL dalam penurunan stunting. Dari ketiga artikel tersebut memiliki kesamaan yang menyoroti peran BKKBN dalam penanganan stunting. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kolaborasi antara BKKBN Jawa Timur dan Komisi IX tidak hanya mencerminkan sinergi kebijakan publik, tetapi juga menjadi ruang komunikasi politik yang berpotensi digunakan sebagai sarana pencitraan elektoral. Meskipun data menunjukkan tren penurunan stunting di Surabaya, belum dapat dipastikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan dampak langsung dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan aktor politik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis dinamika kolaborasi BKKBN Jawa Timur dan Komisi IX dalam kegiatan sosialisasi program penurunan stunting di Surabaya dalam konteks di tahun politik. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi dokemntatif. Wawancara dilakukan dengan perwakilan dari salah satu pihak BKKBN Jawa Timur yakni Bu Dian dan Bu Habibah dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya yang merupakan mitra pelaksana bagian dari BKKBN di tingkat kota. Sementara Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini melalui analisis media daring dan dokumentasi publik yang menampilkan kegiatan sosialisasi oleh anggota legislatif. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kegiatan sosialisasi dikomunikasikan kepada publik serta siapa aktor politik yang terlibat. Informasi dari media daring menjadi penting untuk melengkapi dan memperkuat data primier dari hasil wawancara. Pengamatan terhadap simbol-simbol komunikasi politik, seperti penyisipan atribut partai turut menjadi perhatian dalam analisis ini. Selain itu, data sekunder seperti adanya laporan angka prevelensi stunting di Surabaya 2021-2024 digunakan untuk menilai antara kegiatan sosialisasi dan dampak yang diharapkan dalam menurunkan angka stunting.

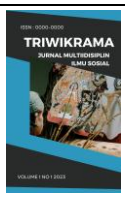
KERANGKA TEORI

Teori Kebijakan Publik

Dalam memahami pelaksanaan program pemerintah, pendekatan kebijakan publik menjadi kerangka penting untuk melihat bagaimana suatu masalah masyarakat direspon oleh negara. Menurut James E. Anderson kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan, dilakukan oleh aktor atauk kelompok aktor pemerintah, untuk mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Kebijakan publik tidak hanya terbatas pada peraturan atau dokumen administratif, melainkan mencakup keseluruhan proses politik yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijkan. Dalam pandangan Anderson, kebijakan publik memiliki sifat yang terstruktur dan bertujuan yang disusun melalui proses yang melibatkan berbagai aktor negara dan non-negara, di mana masing-masing memiliki pengaruh terhadap isi, arah, dan keberhasilan kebijakan tersebut (Suaib et al., n.d.).

Oleh karena itu, kebijakan publik bukanlah produk akhir yang statis tetapi merupakan hasil dari proses interaksi yang dinamis antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan, nilai, dan kekuasaan yang berbeda. Melalui teori kebijakan publik James E. Anderson, penelitian ini memandang kebijakan dalam penanganan stunting sebagai bagian dari proses politik yang kompleks, di mana isi dan arah kebijakan dapat dipengaruhi oleh cara implementasinya dan oleh siapa yang menjalankan.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Teori Komunikasi Politik & Agenda Setting

Teori komunikasi politik dan agenda setting saling melengkapi dalam menjelaskan proses komunikasi dan pembentukan perhatian publik terhadap isu-isu politik dan sosial. Komunikasi politik merupakan proses yang tidak hanya menyangkut tentang penyampaian pesan, tetapi juga mengandung kekuatan untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk arah kepentingan politik dalam masyarakat. Model komunikasi yang sederhana dan mudah untuk dipahami sehingga sering diterapkan oleh Harold D. Lasswell, menggambarkan proses komunikasi menggunakan 5 pertanyaan: “Who says what, in which channel, to whom, with what effect?”. Artinya, komunikasi politik dapat dianalisis secara sistematis dengan melihat siapa yang berbicara, pesan apa yang dapat dianalisis secara sistematis dengan melihat siapa yang berbicara, pesan apa yang disampaikan, melalui media apa, kepada siapa targetnya, dan apa dampak bagi masyarakat.

Pada sosialisasi program percepatan penurunan stunting menunjukkan adanya pembangunan komunikasi yang dilakukan oleh pihak BKKBN Jawa Timur bersama Komisi IX DPR RI. Kegitaan ini tidak hanya sebagai penyebaran informasi kesehatan, tetapi juga memuat komunikasi politik karena melibatkan aktor politik yang memiliki kepentingan representatif dan elektoral. BKKBN Jawa Timur dan Komisi IX menjadi komunikator yang menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan menciptakan perubahan perilaku serta membangun legitimasi politik.

Selain menggunakan teori komunikasi politik dari Laswell, penelitian ini juga mencakup dalam pandangan Eep Saefulloh Fatah, komunikasi politik bukan hanya tentang bagaimana menyampaikan pesan. Namun, juga menciptakan makna dengan simbol-simbol representasi visual, melalui logo partai, warna, bendera, gambar tokoh yang bukan sekedar ornamen tetapi juga dapat menonjolkan aktor politik di ruang publik dalam membentuk presepsi serta mempertkuat daya tarik elektoral (Thaib, 2019).

Di sisi lain, teori agenda setting dari McCombs &Shaw menjelaskan bahwa media dan aktor politik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh publik. Melihat bagaimana isu-isu tertentu, seperti stunting, dapat diangkat menjadi fokus perhatian publik melalui peran media dan aktor politik. Sebagaimana media masa yang dikatakan oleh Wright bahwa media masa memiliki kekuatan untuk membuat isu atau peristiwa yang dianggap penting oleh publik dan disebut sebagai agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media dan aktor politik memiliki kemampuan untuk mengatur perhatian masyarakat, bukan dengan memaksa opini, tetapi dengan menentukan isu mana yang dianggap penting untuk dibahas (Nasionalita, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Impelentasi Program Penurunan Stunting dalam Prespektif Kebijakan Publik

Pada prespektif kebijakan publik, implementasi adalah tahap krusial yang menentukan apakah kebijakan yang telah dirumuskan mampu menghasilkan perubahan nyata. Melalui kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia ditegaskan oleh pemerintah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan penetapan target penurunan prevalensi stunting hingga mencapai 14% yang sejalan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Ummah, 2021). Hal ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menyelesaikan masalah gizi kronis yang berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Dalam kebijkaan ini BKKBN ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan, dengan tugas mengkoordinasikan berbagai program, sumber daya, dan aktor yang terlibat dari pusat dan daerah. Berbagai program dijalankan oleh BKKBN

dalam mengatasi masalah stunting, Menurut pandangan James E. Anderson, kebijakan publik tidak hanya dimaknai sebagai keputusan pemerintah dalam bentuk peraturan, tetapi juga sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan serangkaian tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses ini, kebijakan diimplementasikan melalui kolaborasi antara lembaga teknis, aktor politik, dan mitra strategis lainnya. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan program penurunan stunting di Surabaya, di mana BKKBN Jawa Timur bekerja sama dengan Komisi IX DPR RI dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan yang ideal seharusnya mencermikan keselarasan antara tujuan kebijakan dan tindakan para pelaksana di lapangan. Dalam hal ini, BKKBN mempunyai berbagai macam program sebagai bentuk upaya penurunan dan pencegahan stunting, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Rembuk Stunting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Bangga Kencana. Dari semua program tersebut ditargetkan untuk keluarga yang memiliki anak yang kurang gizi, ibu hamil dan menyusui, serta adanya edukasi pra nikah melalui aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) untuk para calon pengantin (Catin). BKKBN Jawa Timur merupakan salah satu pelaksana aktif yang menjalankan program-program dan kegiatan tersebut di tingkat provinsi.Program dan kegiatan BKKBN tersebut sebagai upaya yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menyiapkan generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasioanl jangka panjang. Seluruh program di atas menargetkan kelompok masyarakat renta seperti anak-anak dengan risiko gizi buruk, ibu hamil, dan menyusui, serta catin sebagai langkah intervensi awal yang menyeluruh.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini tidak sepenuhnya lepas dari tantangan politik. Kolaborasi antara BKKBN dan Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja juga diwarnai oleh kepentingan representatif dari pihak legislatif. Komisi IX tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam penentuan arah kebijakan melalui masukan terhadap Perpres No. 72 Tahun 2021, serta ikut menyusun dan menyetujui anggaran yang disalurkan ke program BKKBN. Dukungan ini menjadi bagian dari proses formal dalam sistem kebijakan publik Indonesia, di mana sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif merupakan prasyarat keberhasilan implementasi. Di tingkat daerah, kebijakan nasional tersebut diturunkan melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 yang mengatur teknis pelaksanaan tentang percepatan penurunan stunting secara lebih spesifik di tingkat kota **(WALIKOTA SURABAYA, "Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya" 1965 (2022): 1–22, https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf).** Perwali ini menjadi payung hukum bagi lembaga daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam menjabarkan kegiatan intervensi stunting berbasis keluarga.

Namun, saat melakukan kegiatan sosisalisasi program dilakukan beriringan dengan tahun politik, muncul potensi penyimpangan arah pelaksanaan. Ketika anggota legislatif terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi bagaimana menjaga agar sinergi antara lembaga teknis dan aktor politik tidak menimbulkan deviasi dari tujuan utama kebijakan. Saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan bersama aktor legislatif yang memiliki kepentingan elektoral, maka ruang pelaksaan program publik berpotensi bergeser menjadi ruang komunikasi politik.

Berdasarkan kerangka Anderson, situasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari siapa yang menjalankannya dan dalam konteks apa kebijakan itu diterapkan. Ketika aktor politik terlibat secara langsung dalam ruang-ruang pelaksanaan program, ada potensi terjadinya pergeseran makna dan tujuan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan, terdapat tarik-menarik antara niat institusional dan realitas politik di lapangan. Namun, kolaborasi antar lembaga sangat

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

dibutuhkan dalam mewujudkan efektivitas program. Meskipun program telah berjalan sesuai arah kebijakan nasional, efektivitasnya perlu dikaji ulang tidak hanya dari aspek administratif atau teknis, tetapi juga dalam pelaksanaanya. Sehingga keberhasilan implementasi kebijakan stunting tidak hanya ditentukan oleh struktur program, tetapi juga oleh sejauh mana pelaksana mampu menjaga integritas dan netralitas dalam pelaksanaan program publik agar tidak kehilangan orientasi utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Komunikasi Politik dalam Sosialisasi Program: Antara Edukasi dan Kampanye

Sosialisasi program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh BKKBN Jawa Timur bersama Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, pada dasarnya merupakan kegiatan edukatif dalam ranah komunikasi publik. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi anak, pola asuh sejak kehamilan, dan edukasi pranikah melalui aplikasi ELSIMIL, serta peran keluarga dalam mencegah stunting. Namun dalam pelaksanaanya, kegiatan ini juga berfungsi sebagai ruang komunikasi yang tidak sepenuhnya netral, terutama saat dilakukan bersama aktor politik yang memiliki posisi elektoral. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk menganalisis komunikasi politik menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana pesan disampaikan, siapa yang menyampaikan dan dampak apa yang dihasilkan dari proses komunikasi tersebut.

Berdasarkan model komunikasi politik Harold D. Lasswell, komunikasi dapat dianalisis melalui 5 unsur utama: dengan melihat siapa yang berbicara, pesan apa yang dapat dianalisis secara sistematis dengan melihat siapa yang berbicara, pesan apa yang disampaikan, melalui media apa, kepada siapa targetnya, dan apa dampak bagi masyarakat. Dalam hal ini, BKKBN Jawa Timur dan perwakilan anggota dari Komisi IX, Lucy Kurniasari dari Fraksi Partai Demokrat betindak sebagai komunikator. Lucy Kurniasari atau yang lebih kerap disapa ning Lucy sebagai aktor politik sekaligus representasi daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur I yang meliputi Surabaya-Sidoarjo dengan menggandeng BKKBN Jawa Timur sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan sosialisasi, yang ditujukan kepada masyarakat luas, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, Pasangan Usia Subur (PUS), dan calon pengantin. Sasaran ini sesuai dengan target prioritas BKKBN dalam intervensi pencegahan stunting. Wilayah padat penduduk seperti Surabaya, kegiatan ini memiliki potensi besar dalam menjangkau segmen masyarakat yang sangat strategis dari sisi jumlah pemilih maupun penerima manfaat program.

Keterlibatan ning Lucy dengan memperlihatkan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya berasal dari pihak BKKBN Jawa Timur dan DP3APPKB, tetapi juga disampaikan oleh aktor dengan kepentingan elektoral. Pesan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi mencakup berbagai informasi yang bersifat edukatif, serta upaya kolaboratif dalam mencegah stunting. Isi pesan yang diberikan oleh pihak BKKBN Jawa Timur dan ning Lucy dari kegiatan sosialisasi ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran keluarga dalam menurunkan angka stunting secara nasional. Melihat pernyatan ning Lucy dari berita online ketika melakukan sosialisasi Promosi dan KIE Program Percepatan Penurunan Stunting Kepada Masyarakat di Wilayah Khusus Tahun 2023 di Kelurahan Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya yang menyatakan bahwa, " *Program stunting masih menjadi pr untuk semuanya di mana WHO menargetkan 20% yang berarti lebih 3,5% dengan penangan di Surabaya sudah mencapai 4,8% yang secara teknis penangan ini sudah cukup baik sehingga menjadi sorotan oleh semua kalangan termasuk para Caleg DPR RI dengan adanya program dari Pemkot Surabaya untuk menekan angka stunting dengan melakukan pendampingan ibu hamil dan balita, serta pemberian makanan pendamping yang bertujuan untuk memastikan bahwa di seluruh daerah tidak ada lagi yang kekurangan gizi.*" (Deni, n.d.).

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Menggaris bawahi perkataan ning Lucy bahwa program stunting menjadi sorotan para Caleg DPR RI ini menunjukkan bahwa adanya kesempatan para Caleg memanfaatkan isu ini menjadi perhatian publik. Bahkan selain ning Lucy, ada kehadiran tokoh lain seperti Rasiyo (mantan Sekdaprov Jawa Timur tahun 2009-2013) yang juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat juga turut hadir menemani yang semakin memperkuat indikasi bahwa kegiatan ini tidak semata-mata edukatif, melainkan turut dimanfaatkan sebagai panggung komunikasi politik. Rasiyo dalam kegiatan sosialisasi ini juga turut memberikan pesan terkait intervensi gizi untuk mengatasi masalah stunting dengan mengatakan, *"Stunting merupakan masalah serius yang dapat menghambat pembangunan bangsa. Stunting dapat menyebabkan anak kurang produktif di masa depan. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras untuk mengatasi masalah stunting"* (Deni, n.d.). Dari pesan ning Lucy dan Rasiyo ini bisa disimpulkan bahwa mereka mengharapakan Surabaya menjadi kota zero stunting di tahun 2024.

Komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini sangat beragam, mulai dari pertemuan langsung oleh masyarakat hingga publikasi melalui media sosial, serta peliputan di portal berita daring. Pembentukan komunikasi dari berbagai saluran tersebut memungkinkan pesan menjangkau audiens secara luas, baik secara fisik maupun digital. Adapun dampak yang diharapkan dari komunikasi ini adalah terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya mencegah stunting melalui perubahan perliku. Namun, selain dampak edukatif, juga muncul dampak politis yaitu, terbentuknya presepsi elektoral terhadap aktor politik yang tampil dalam kegiatan tersebut. Masyarakat tidak hanya menerima informasi kesehatan, tetapi juga mulai mengasosiasikan program tersebut dengan figur Lucy Kurniasari dan Rasiyo sebagai pembawa pesan, sehingga memperkuat citra kepedulian dan kedekatan politisi terhadap isu rakyat.

Memperkuat analisis adanya komunikasi politik dalam kegiatan sosialisasi stunting yang dilakukan oleh ning Lucy bersama BKKBN Jawa Timur melalui pendekatan Eep Saefulloh Fatah yang menyoroti adanya aspek simbolik melalui gestur, warna, angka, dan visualisasi tokoh dalam komunikasi politik. Eep menjelaskan bahwa komunikasi politik tidak hanya soal menyampaikan pesan secara verbal, tetapi juga menyisipkan makna melalui simbol-simbol yang dapat membentuk citra dan presepsi publik.



Gambar 1: Anggota DPR RI, Lucy Kurniasari (tengah) bersama masyarakat usai sosialisasi Program Bangga Kencana di Stiesia, Surabaya

Sumber 1: https://www.telusur.co.id/detail/jelang-kampanye-berakhir-lucy-kurniasari-targetkan-raih-100-ribu-suara

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, ditemukan dokumentasi visual yang memperlihatkan ning Lucy berdiri bersama para perseta kegiatan mengankat jari telunjuk, yang memperlihatkan gestur yang identik dengan simbol nomor urut satu, di mana nomor urut tersebut merupakan identitasnya sebagai Caleg di Partai Demokrat. Selain itu, dalam dokumentasi tersebut tidak hanya memperlihatkan ning Lucy, Rasiyo juga turut hadir kembali dalam menemani kegiatan sosialisasi yang dilakukan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) dan beliau juga mengakat jari telunjuknya sebagai identitasnya nomor urut 1 dapil DPRD Jawa Timur. Penggunaan warna biru dalam pakaian yang dikenakan juga mencerminkan identitas partai yang diwakilinya.

Selain itu, dalam salah satu pernyataanya yang di muat di media *Telusur.co.id*,(Deni, 2024) Lucy Kurniasari secara tidak langsung mengungkapkan bahwa target politiknya untuk memperoleh dukungan sebesar 100 ribu suara dan mempertahankan kursi DPR RI periode ke-4nya di Senayan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan publik yang di lakukan, termasuk kegiatan sosialisasi bersama BKKBN, tidak sepenuhnya lepas dari tujuan elektoral. Pernyataan tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa ruang edukasi kesehatan, khususnya sosialisasi program stunting, juga dimanfaatkan sebagai strategi komunikasi politik untuk memperkuat citra dan menjaring suara pemilih menjelang pemilu.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bu Dian pihak dari BKKBN Jawa Timur ketika wawancara yang mengatakan bahwa, "*Adanya kegiatan sosialisasi bersama anggota Komisi IX ditengah tahun politik akan menimbulkan banyak sekali agenda kampanye terselubung yang dibingkai dengan agenda sosialisasi. Namun, kegiatan kampanye terselubung ini dilakukan ketika kegiatan sosialisasi bersama BKKBN dalam pemberian edukasi kesehatan telah usai dilakukan. Mereka melakukan sosialisasi dengan mengganti atribut partai dan menggunakan simbol-simbol dari partai.*"[2] Dalam praktinya, setelah penyuluhan selesai, atribut partai mulai digunakan, dan kegiatan diarahkan pada penguatan identitas partai politik yang menimbulkan ruang komunikasi ganda.

Simbol-simbol ini tidak muncul tanpa makna. Dalam komunikasi polik, elemen-elemen seperti angka, warna, dan gestur tubuh berfungsi sebagai bentuk penyampaian pesan non-verbal yang kuat. Meskipun tidak secara eksplisit mengkampanyekan diri, penggunaan simbol tersebut merupakan bagian dari strategi pencitraan yang efektif. Simbol visual lebih mudah untuk diingat oleh publik dibandingkan pesan verbal, dan dalam ruang sosialisasi program pemerintah, kehadiran simbol politik menciptakan ruang komunikasi ganda. Melalui pendekatan ini, kegiatan sosialisasi dapat dipahami bukan hanya sebagai bentuk pelaksanaan program publik, tetapi juga sebagai media komunikasi politik yang sarat dengan pesan tersembunyi. Pesan edukatif disampaikan bersama dengan upaya penguatan identitas politik, sehingga publik menerima dua pesan sekaligus yakni pesan kesehatan dan pesan elektoral. Kegiatan Lucy Kurniasari dalam kegiatan tersebut tidak hanya menciptakan efek normatif, tetapi juga membangun kedekatan emosional dan politik dengan masyarakat dapilnya.

Dengan menggabungkan teori Lasswell dan pendekatan simbolik Eep Saefulloh Fatah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik dalam sosialisasi stunting tidak netral, karena ada 2 tujuan di mana ada tujuan untuk mengedukasi kesehatan yang menjadi tugas negara, dan tujuan untuk kampanye halus yang membangun citra politik di ruang publik. Ketika kedua fungsi ini tidak dibedakan secara tegas, maka terdapat risiko pencampuran antara pelayanan publik dan kepentingan elektoral, yang dalam jangka panjang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah itu sendiri. Namun, dalam hal ini pihak DP3APPKB yakni Bu Habibah menegaskan dengan menyatakan,*"Kami di pemerintahan Surabaya mengikuti*

[2] Wawancara oleh Bu Dian pihak BKKBN Jawa Timur, 16 April 2025

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

peraturan dari pusat yakni sebagai ASN tidak boleh mihak disalah satu partai dan tidak boleh ikut dalam kegiatannya harus bersifat netral tidak berpihak dan saat adanya kegiatan sosialisasi ini juga adanya pemantaun. Kami hanya sebatas menyampaikan perihal edukasi stunting Bangga Kencana bersama penyuluh KB dan para tim kader KB dan setelahnya kami tidak ikut campur karena baisanya dilanjutkan oleh kegiatan parpol terkait adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh anggota legislatif."[3] Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran institusional terhadap pentingnya menjaga integritas pelayanan publik di tengah dinamika politik. Sehingga diperlukan etika komunikasi yang ketat agar kegiatan sosialisasi tetap berada dalam kerangka pelayanan publik dan tidak tercampur oleh kepentingan politik jangka pendek.

Fenomena ini juga sejalan dengan teori agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donal Shaw menyatakan bahwa media dan aktor politik memiliki kekuatan untuk mengarahkan perhatian publik terhadap isu tertentu. Stunting sebagai isu kesehatan sejatinya memiliki urgensi yang tinggi secara nasional. Namun, ketika isu stunting ini diangkat secara konsisten oleh aktor politik dalam forum-forum publik dan mendapat sorotan dari media massa, maka hal ini tidak hanya menjadi agenda kesehatan, tetapi juga bertransformasi menjadi agenda politik karena publik mulai menganggap bahwa aktor tersebut merupakan representasi dari isu tersebut. Hal ini dapat diamati dalam pemberitaan dari berbagai portal media online seperti Metro Times, Suara Jawa Timur Post, Radio Republik Indonesia, dan telusur.co.id yang mengangkat kegiatan sosialisasi ning Lucy di Surabaya.

Dalam beberapa laporan melalui berita dan wawancara yang peneliti dapatkan, ning Lucy tampil aktif menyampaikan pentingnya gizi keluarga, kesiapan pranikah, dan peran orang tua dalam mencegah stunting. Namun di sisi lain, media juga menampilkan dokumentasi visual yang memperlihatkan ning Lucy bersama audiens mengangkat jari telunjuk, serta mengenakan pakaian berwarna biru khas Partai Demokrat, yang menandakan adanya komunikasi politik yang tidak eksplisit tetapi bersifat simbolik. Pemberitaan ini menciptakan efek ganda. Di satu sisi, media membantu menyebarluaskan informasi terkait pentingnya pencegahan stunting sebagai bagian dari program nasioanl. Namun di sisi lain, pemberitaan tersebut juga memperkuat eksistensi tokoh politik yang tampil dalam kegiatan tersebut. Ketika media menampilkan narasi dan gambar yang berfokus pada figur, maka publik mulai mengkaitkan keberhasilan atau pelaksanaan program dengan tokoh tersebut. Inilah yang di sebut McCombs dan Shaw sebagai efek agenda setting melalui isu publik yang dibingkai secara politis melalui peran media dan komunikasi strategis dari aktor yang terlibat.

Portal berita daring memiliki peran signifikan dalam proses ini karena jangkauannya yang luas dan kemampuannya membentuk presepsi secara cepat. Keterlibatan ning Lucy dalam sosialisasi program stunting menjadi sorotan publik tidak hanya karena peran legislatifnya, tetapi karena eksposur media yang menampilkan dirinya sebagai figur utama dalam kegiatan tersebut. Pemberiitaan tersebut tidak hanya berisi informasi edukatif, tetapi secara implisit juga membentuk citra politik tokoh tersebut sebagai sosok yang aktif, dekat dengan masyarakat, dan peduli terhadap isu kesehatan.

Proses pembingkaian isu stunting dalam kegiatan sosilisasi yang melibatkan ning Lucy tidak hanya bertujuan menciptakan kesadaran terhadap kesehatan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembentukan opini publik. Penggunaan teori Lasswell, pendekatan simbolik Eep Saefulloh Fatah, dan konsep agenda setting McCombs & Shaw dalam penelitian ini menjelaskan bahwa komunikasi dalam sosialisasi stunting telah mengalami perluasan fungsi,

[3] Wawancara oleh Bu Habibah pihak DP3APPKB, 2 Mei 2025.

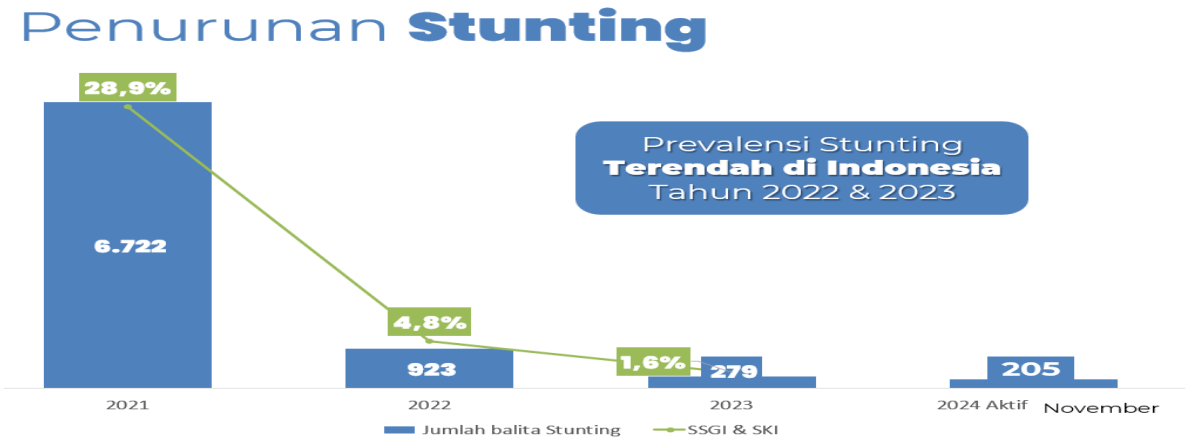
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

bukan sekedar menyampaikan informasi kesehatan, tetapi juga digunakan sebagai alat pembentukan citra politik dan penguatan identitas elektoral.

Dampak dan Implikasi terhadap Efektivitas Program

Melihat data yang tercatat dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa Kota Surabaya mengalami tren penurunan stunting yang cukup tajam. Pada tahun 2021, jumlah balita stunting tercatat sebanyak 6.722 anak dengan prevelensi 28,9%. Angka ini turun secara signifikan pada 2022 menjadi 923 anak (4,8%), kemudian berkurang lagi menjadi 279 anak (1,6%) pada tahun 2023. Hinga September 2024, jumlah balita stunting tercatat sebesar 205 anak, meskipun data ini masih bersifat sementara. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat kota.

Gambar 2 . Data tabel penurunan stunting di Surabaya



Sumber 2. Dinas Kesehatan Kota Surabaya 2024

Namun, penurunan angka stunting ini tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai dampak langsung dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan anggota Komisi IX DPR RI. Sosialisasi memang memiliki peran dalam membangun kesadaran masyarakat, tetapi belum ada indikator yang secara eksplisit mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi politis tersebut terhadap penurunan prevalensi stunting. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aktor legislatif seperti Lucy Kurniasari di Surabaya kerap kali diiringi dengan simbol dan narasi politik yang menjadikan program edukatif ini berpotensi sebagai bagian dari komunikasi politik elektoral.

Jika ditinjau secara lebih mendalam, keberhasilan dalam mnurunkan angka stunting lebih rasional untuk dikaitkan dengan serangkaian program teknis dan intervensi struktural yang dijalankan oleh BKKBN dan pemerintah daerah. Program seperti DAHSAT, GENTING, Rembuk Stunting, Bangga Kencana, serta edukasi pranikah melalui aplikasi ELSIMIL, telah menyasar kelompok rentan secara langsung dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, peran petugas lapangan, penyuluh KB, kader KB, serta lembaga teknis lainnya turut berkontribusi besar terhadap proses perubahan perilaku masyarakat yang menjadi inti dari pencegahan stunting. Perwali juga memperkuat bentuk dukungan dari adanya program tersebut.

Menilai efektivitas program hanya dari dimensi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh anggota legislatif berisiko menyederhanakan kompleksitas pelaksanaan kebijakan publik. Kegiatan tersebut hanya berdampak secara permukaan atau jangka pendek, terutama karena dilakukan dalam suasana politik elektoral karena dari beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Surabaya oleh figur politik juga disertai dengan pencitraan personal dan simbol-simbol partai, yang secara etis berpotensi mencampuradukkan antara ruang pelayanan publik dan kepentingan kampanye. Media dan eksposur visual terhadap figur politis berperan

membentuk presepsi publik terkait keberhasilan penurunan stunting bukan hasil kolaborasi institusi yang akan berdampak pada cara publik menilai efektivitas program dan legitimasi lembaga yang melaksanakannya.

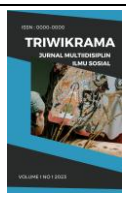
Meskipun data menunjukkan tren penurunan stunting, penilaian terhadap efektivitas program tetap harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Perlu adanya pembeda yang jelas antara keberhasilan program berbasis kelembagaan dan intervensi teknis, dengan aktivitas yang cenderung bersifat politis dan pencitraan. Sehingga dalam penelitian ini pemerintah daerah dan BKKBN Jawa Timur perlu menegakkan standar etika yang lebih ketat dalam pelaksanaan sosialisasi program publik, terutama ketika melibatkan mitra politik. Diperlukan pemisahan yang tegas antara ruang edukasi dan ruang politik agar tidak terjadi pencampuran kepentingan. Penilaian efektivitas program stunting perlu diarahkan pada capaian institusional dengan evaluasi yang mencakup indikator teknis, perubahan perilaku masyarakat, serta keberlanjutan program secara jangka panjang. Selain itu, keberhasilan program penurunan stunting juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan kapasitas dan peran kader KB, penyuluh, dan relawan sebagai ujung tombak yang netral dalam menyampaikan edukasi berbasis data dan kebutuhan lokal. Sehingga diharapkan program percepatan penurunan stunting dapat berjalan secara berkelanjutan, akuntabel, dan tetap fokus pada kepentingan masyarakat bukan kepentingan lokal.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kolaborasi sosialisasi program penurunan stunting antara BKKBN Jawa Timur dan Komisi IX DPR RI di Surabaya dalam tahun politik memiliki dua tujuan yang saling bertemu dalam satu ruang, yakni edukasi kesehatan publik dan komunikasi politik. Di satu sisi, kegiatan sosialisasi ini berperan penting dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat, terutama terkait gizi anak, kesiapan pranikah, dan pola asuh yang tepat. Namun di sisi lain, keterlibatan aktor politik dalam forum edukatif ini membuka ruang bagi munculnya simbol-simbol elektoral dan praktik prncitraan yang menyertai pelaksanaan program.

Meskipun data prevelensi stunting di Surabaya menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024, keberhasilan ini belum dapat dipastikan berasal dari efektifitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh anggota legislatif. Ada kemungkinan bahwa penurunan ini lebih disebabkan oleh rangkaian program teknis dan intervensi langsusng yang dijalankan oleh BKKBN Jawa Timur dan perangkat daerah Surabaya, seperti DASHAT, GENTING, Bangga Kencana, ELSIMIL, serta penguatan kader dan penyuluhan KB di lapangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik tidak cukup diukur dari angka capaian saja, tetapi juga harus mempertimbangkan proses komunikasi dan konteks politik, dibutuhkan batas etis yang tegas agar pesan-pesan edukatif tidak dibelokan menjadi alat penguat citra politik. Dengan menggunakan teori komunikasi politik Harold D. Lasswell, pendekatan simbolik Eep Saefulloh Fatah, serta konsep agenda setting dari McCombs dan Shaw, dalam penelitian ini perlu ditekankan terhadap pentingnya menjaga netralitas ruang edukasi publik dari pengaruh kepentingan elektoral. Hanya dengan cara itu, kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dapat tetap terjaga dan tujuan utama dari kebijkan dengan meningkatkan kualitas hidup generasi bangsa dapat benar-benar tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

Ariyanto, Syuhada, K., & Nurjannah, S. (2023). Peran BKKBN Dalam Penanganan Stunting Melalui Program Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Menikah Dan Siap Hamil) Di Lombok Timur. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, *1*(2), 102–113.

Deni, A. (n.d.). *Gencarkan Penanganan Stunting, Ning Lucy Harap Kota Surabaya Zero Stunting pada 2024*. telusur.co.id. https://telusur.co.id/detail/gencarkan-penanganan-stunting-ning-lucy-harap-kota-surabaya-zero-stunting-pada-2024

Deni, A. (2024). *Jelang Kampanye Berakhir, Lucy Kurniasari Targetkan Raih 100 Ribu Suara*. 2024-02-09. https://www.telusur.co.id/detail/jelang-kampanye-berakhir-lucy-kurniasari-targetkan-raih-100-ribu-suara

Mustika, W., & Syamsul, D. (2018). Analisis Permasalahan Status Gizi Kurang Pada Balita di Puskesmas Teupah Selatan Kabupaten Simeuleu. *Jurnal Kesehatan Global*, *1*(3), 127. https://doi.org/10.33085/jkg.v1i3.3952

Nasionalita, K. (2014). Relevansi Teori Agenda Setting Dalam Dunia Tanpa Batas. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, *5*(2), 156. https://doi.org/10.30659/jikm.5.2.156-164

Pratiwi, R., Untari, J., & Samosir, H. R. (2024). *Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *9*(3), 196–209.

Qadir, S. A., Hadiati, H., & Intani, R. (2024). STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM ANTI STUNTING ANGGOTA DPR DI DAERAH PEMILIHAN (Studi Kasus Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska Daerah Pemilihan Sumatera Barat I). *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, *10*(1), 1–10. https://doi.org/10.32509/dinamika.v10i1.4302

Suaib, H., R.S.Rakia, A. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (n.d.). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=h7pvEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Suaib+Hermanto,+dkk.+“Pengantar+Kebijakan+Publik”,+ed.+1.+(Makassar:+Humanities+Genius,+2022),+hal+&ots=lc0I1zpRNq&sig=ltgZ46UOUBmYYL7_gK3Esu2q0lI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Thaib, E. J. (2019). Komunikasi Politik Ditinjau dari Perspektif Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik dan Komunikasi Islam. *Farabi*, *16*(1), 1–18. https://doi.org/10.30603/jf.v16i1.1030

Ummah, M. S. (2021). Buku Kebijakan Dan Strategi Percepatan P enurunan Stunting Di Indonesia. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

WALIKOTA SURABAYA. (2022). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022TentangPercepatan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya*. *1965*, 1–22. https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf

Wawancara

Dian Indreswari, SE, Pegawai BKKBN Jawa Timur, *Wawancara Rabu, 16 April 2025*

Habibah, Pegawai DP3APPKB Surabaya, *Wawancara Jum’at, 2 Mei 2025*